

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

#### 3.1. Profil Dan Sejarah Perusahaan



(Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki wewenang mengatur peredaran uang di Indonesia. Selain itu Bank Indonesia juga memiliki tujuan untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas keuangan di Indonesia.

Bank Indonesia (BI) berawal dari *De Javasche Bank NV* (DJB) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1827. Pada waktu itu, DJB bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya serta melakukan kegiatan bank umum. Pemerintah Belanda memberikan hak oktrooi kepada DJB yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden Belanda.

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953 dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Dewan Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah kebijakan moneter ditetapkan meski tanggung jawabnya berada di tangan pemerintah.

Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan dewan moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter.

Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

### **3.2. Perusahaan**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur dan seorang Deputi Gubernur Senior serta sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Adapun susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Gubernur	: Perry Warjiyo
Deputi Gubernur Senior	: Mirza Adityaswara
Deputi Gubernur	: 1. Erwin Rijanto
	2. Sugeng
	3. Rosmaya Hadi
	4. Dody Budi Waluyo

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

#### **3.2.1. Tugas Dewan Gubernur Bank Indonesia**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Tugas utamanya yaitu:

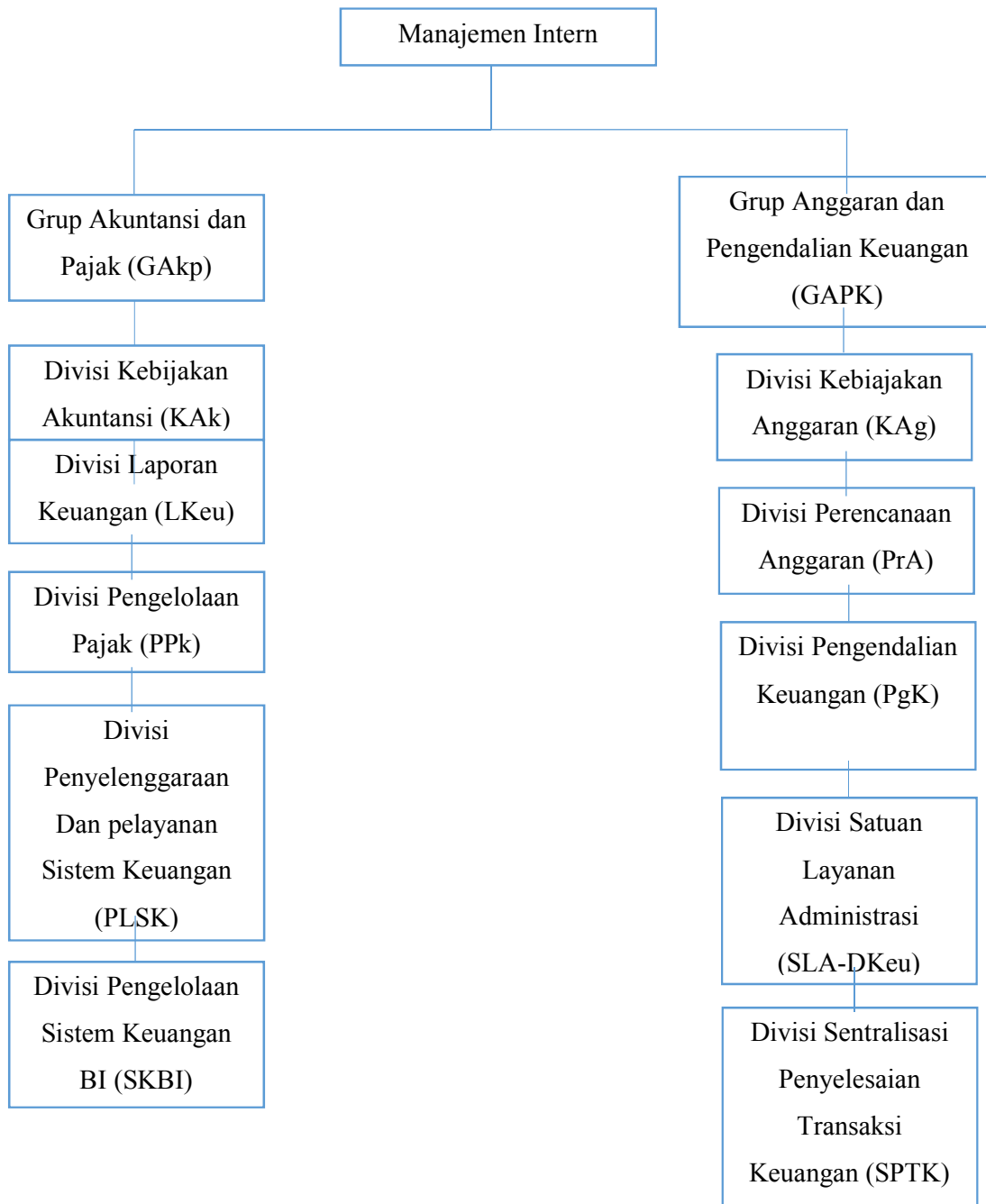
1. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

2. Menjaga inflasi tetap rendah dengan berbagai bauran kebijakan dan koordinasi lintas *stakeholder*.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dengan mengutak-atik instrumen, tapi juga *pro-growth policy*.
4. Mempermudah izin pembayaran *online financial technology (fintech e-payment)*.
5. Membangun sistem pembayaran yang aman dan efisien

### **2.2.2. Struktur Organisasi Departemen Keuangan (Dkeu)**

Bank Indonesia memiliki beberapa satuan kerja, salah satunya satuan kerja Departemen Keuangan (Dkeu) yang terbagi menjadi 2 grup, yaitu grup Akuntansi dan Pajak (GAkP) dan grup Anggaran dan Pengendalian Keuangan (GAPK). Grup Akuntansi dan Pajak (GAkP) terdiri dari, Divisi Kebijakan Akuntansi (KAk), Divisi Laporan Keuangan (LKeu), Divisi Pengelolaan Pajak (PPk), Divisi Penyelenggaraan dan Layanan Sistem Keuangan (PLSK), dan Divisi Pengelolaan Sistem Keuangan BI (SKBI). Sedangkan grup Anggaran dan Pengendalian Keuangan (GAPK) terdiri dari, Divisi Kebijakan Anggaran (KAg), Divisi Perencanaan Anggaran (PrA), Divisi Pengendalian Keuangan (PgK), Satuan Layanan Administrasi (SLA-DKeu), dan Divisi Sentralisasi Penyelesaian Transaksi Keuangan (SPTK).

### Struktur Organisasi Departemen Keuangan Bank Indonesia



Gambar 3.1. Struktur Organisasi

(Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

### 2.2.3. Divisi PLSK

Selanjutnya penulis akan menjabarkan kegiatan yang dikerjakan pada Divisi Laporan Keuangan. Divisi Penyelenggaraan sistem keuangan (PLSK). Adapun tugas pokok divisi PLSK di dalam surat edaran departemen keuangan meliputi :

1. Melakukan setting kalender untuk operasional aplikasi sistem keuangan Bank Indonesia.
2. Melaksanakan fungsi buka aplikasi pada awal hari dan tutup aplikasi pada akhir hari operasional.
3. Memantau operasional aplikasi sistem keuangan Bank Indonesia.
4. Melaksanakan testing berkala terhadap kesiapan operasional kontinjensi
5. Menyelenggarakan pelatihan secara berkala, termasuk kurikulum dan bahan pelatihan aplikasi.
6. Menatausahakan arsip dan dokumen seksi.
7. Mengelola Grup Pengguna Dan Grup Fungsi dalam aplikasi sistem keuangan bank indonesia.
8. Mengelola pengguna yang berperan sebagai penyelenggara dan Administrator kantor.
9. Menatausahakan data master aplikasi sistem keuangan BI yang menjadi kewenangan penyelenggara.
10. Menatausahakan data primer anggaran dan akunting dari aplikasi sistem keuangan bank indonesia untuk diolah/diproses lebih lanjut oleh *user*

11. Mengkoordinir penyelesaian masalah akurasi data.
12. Menyelesaikan gangguan operasional aplikasi sistem keuangan bank indonesia secara harian.
13. Melakukan koordinasi penyelesaian gangguan aplikasi dengan *solver* teknologi informasi dan pemelihara aplikasi.
14. Melakukan monitoring terhadap *setting* sistematis akun akuntansi dan anggaran satuan kerja serta *setting* pengguna termasuk perubahan data atas pengguna yang mutasi.
15. Melakukan monitoring terhadap transaksi antar sistem dan kantor.
16. Melakukan monitoring saldo rekening *overdraft*, rekening tidak aktif, rekening antara tunai yang masih harus diperhitungkan dengan anggaran.
17. Melakukan pemantauan dan monitoring data dan kewajaran nilai *Net currency position* (NCP) termasuk mengkoordinasikan tindak lanjutnya.

### **2.3. Bidang Usaha Perusahaan**

Bank Indonesia merupakan suatu organisasi yang bertujuan tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Berbeda dengan bank-bank lainnya, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu stabilitas nilai terhadap barang dan jasa, dan stabilitas terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, dan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran-sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia disertai dengan pertanggung jawabannya. Dengan demikian tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini dapat diukur dengan mudah.

#### **2.4. Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia**

Kebijakan Akuntansi Keuangan BI (KAKBI) adalah suatu prinsip yang mengatur akuntansi yang sesuai atas kelompok transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank Indonesia. Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang Negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.

KAKBI digunakan sebagai acuan untuk menetapkan perlakuan akuntansi yang sesuai atas kelompok transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan Bank Indonesia dan mulai berlaku terhitung dari tanggal 1 Juni 2014. Bank Indonesia memiliki karakteristik unik sehingga perlu disusun KAKBI. Keunikan yang dimiliki Bank Indonesia meliputi:



1. Legalitas Entitas. Independensi entitas pelaporan tersendiri.
2. Tujuan. Kinerja Bank Indonesia tidak dapat diukur sepenuhnya dalam satuan mata uang.
3. Entitas Ekonomi. Tidak unik dapat mengacu pada praktik akuntansi umum dan unik sehingga memerlukan konsepsi akuntansi.
4. Pengguna Informasi.
5. Transaksi atau proses bisnis

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). Dalam kerangka ini *inflasi* merupakan sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi guna memperkuat efektivitasnya.

### **Visi**

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara Negara *emerging markets*.

### **Misi**

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.

2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi structural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.